

HAMBATAN PELAKSANAAN BAB XIII UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN  
2012 TENTANG PEMBUBARAN, PENYELESAIAN DAN HAPUSNYA BADAN  
HUKUM KOPERASI

(Study Kasus di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi)

ARTIKEL ILMIAH

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

ANNISA IMAMI KHASANAH

NIM. 0910111003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2013

## LEMBAR PERSETUJUAN

**Judul Artikel : HAMBATAN PELAKSANAAN BAB XIII UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PEMBUBARAN, PENYELESAIAN DAN HAPUSNYA BADAN HUKUM KOPERASI.**  
**(Study Kasus di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi)**

Identitas Penulis :  
a. Nama : Annisa Imami Khasanah  
b. NIM : 0910111003  
Konsentrasi : Hukum Perdata Ekonomi dan Bisnis  
Jangka Waktu Penelitian: 6 Bulan

Disetujui Pada Tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Herman Suryokumoro SH. MS.

M. Zairul Alam SH.MH

NIP.19560528 198503 1 002

NIP. 19740909 200601 1 002

Mengetahui,

Kepala Bagian Hukum Perdata

Siti Hamidah, S.H.,M.M.

NIP : 19660622 199002 2 001

# **HAMBATAN PELAKSANAAN BAB XIII UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PEMBUBARAN, PENYELESAIAN DAN HAPUSNYA BADAN HUKUM KOPERASI**

**(Study Kasus di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi)**

Oleh

Annisa Imami Khasanah

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: [annisaimami23@gmail.com](mailto:annisaimami23@gmail.com)

## **ABSTRAKSI**

Penelitian ini menganalisis dan memberikan solusi agar pelaksanaan pembubaran, penyelesaian dan hapusnya badan hukum koperasi dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, selain itu penelitian ini juga dilakukan untuk meminimalisasi adanya praktek koperasi nakal yang dapat merugikan anggota dan kreditur koperasi. Oleh karena itu penulis menganalisa implementasi mekanisme pembubaran koperasi di Banyuwangi apakah telah sesuai dengan BAB XIII Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pembubaran, Penyelesaian dan Hapusnya Badan Hukum Koperasi, serta menganalisa hambatan yang muncul saat pelaksanaan pembubaran koperasi dilakukan dan solusi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM dalam mengatasi hambatan tersebut.

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis. Dengan lokasi penelitian di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi. Kemudian seluruh data yang diperoleh di analisa secara deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Dinas Koperasi dan UMKM melakukan pembubaran, penyelesaian dan hapusnya badan hukum koperasi dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah karena Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian belum dilengkapi dengan Peraturan Pelaksana. Hambatan yang ditemui Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi dalam pelaksanaan pembubaran koperasi adalah kurangnya Tim Teknis untuk melakukan penelitian mengenai pemeriksaan kesehatan dan pemerinkatan koperasi, anggaran pembubaran koperasi dari Menteri yang tak kunjung turun sehingga pelaksanaan pembubaran koperasi menjadi lambat dan tertunda, penyalahgunaan wewenang oleh pengurus koperasi, anggota koperasi yang tidak setuju dengan pembubaran koperasi, kreditur koperasi tidak setuju dengan pembubaran koperasi serta aset yang dimiliki koperasi tidak cukup untuk membayar seluruh hutang koperasi. Solusi yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM untuk mengatasi hambatan tersebut adalah mengadakan Pra Rapat pembubaran dengan pengurus, anggota dan pengawas koperasi, melakukan amalgamasi, melakukan pembinaan, serta memberi saran kepada anggota untuk mengajukan gugatan kepengadilan terhadap pengurus yang menyalahgunakan wewenang.

Saran dari penulis adalah agar Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi melakukan Penelitian secara intensif dan semua pihak baik Dinas Koperasi dan UMKM, Pengurus Koperasi dan Anggota Koperasi menaati Undang-Undang Perkoperasian khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah

agar pelaksanaan pembubaran, penyelesaian dan hapusnya badan hukum koperasi berjalan dengan lancar. Serta perlu dibuat aturan yang tegas mengenai pengurus koperasi yang menyalahgunakan wewenangnya sebagai pengurus, agar pengurus koperasi jera.

**Kata Kunci: Pelaksanaan Pembubaran Koperasi**

## ABSTRACT

This research analyzing and provide solutions to the dissolution, completion and voidance legal entity cooperative would go well and in accordance with the applicable acts, besides this research also done to minimize the a cooperative practice hussy can harm members and creditor cooperative. Therefore, the author analyses the implementation mechanism of the dissolution of a cooperative in Banyuwangi does have in accordance with BAB XIII Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pembubaran, Penyelesaian dan Hapusnya Badan Hukum Koperasi, as well as analysing the obstacles that arise during the implementation of the dissolution of a cooperative made and solutions made by the Department of cooperatives and SMES in overcoming these obstacles.

This research uses the juridical sociological research. The research at the Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi. Then the data obtained in the analysis is descriptive analysis. The results of this research concluded that the Dinas Koperasi dan UMKM do dissolution, completion, and abolishment of legal entity cooperative by using Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah because Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian not furnished with Peraturan Pelaksana. Obstacles encountered by Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi in the implementation of the dissolution of a cooperative is lack of a technical Team to conduct research on the pemeriksaan kesehatan and pemeringkatan koperasi, budget dissolution cooperative from the minister not been fell so that the implementation of the dissolution cooperative to be slow and overdue, abuse of authority by the board of cooperatives, cooperative members who do not agree with the dissolution of the cooperative, the cooperative creditors do not agree with the dissolution of the cooperative as well as cooperative owned assets are not sufficient to pay all debts of cooperatives. The solution by Dinas Koperasi dan UMKM to overcome these obstacles is to conduct Pre dissolution of the board meeting, members of cooperatives and supervisors, do amalgamation, conduct training, and advising members to court to file a lawsuit against officials who abuse their authority.

The advice of the author is to make the Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi doing intensive research and Dinas Koperasi dan UMKM, Managers of cooperatives and cooperative members comply with Undang-Undang Perkoperasian particularly Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah, to the implementation of dissolution, the completion, and the nullification legal entity of cooperative runs smoothly. As well as strict rules need to be made concerning the management of the cooperative who abuse his authority as an administrator, so that board cooperative deterrent.

**Keywords: implementation of the dissolution of a cooperative**

## I. PENDAHULUAN

Koperasi Indonesia merupakan suatu wadah untuk menyusun perekonomian rakyat yang berdasarkan kekeluargaan dan kegotong royongan serta merupakan ciri khas dari tata kehidupan bangsa Indonesia dengan tidak memandang golongan, aliran maupun kepercayaan.<sup>1</sup> Sesuai dengan landasan filosofis koperasi yaitu Pancasila, maka koperasi harus memiliki nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sila ke-4 dan ke-5 yaitu, nilai kebersamaan, gotong-royong, kekeluargaan dan keadilan sosial.

Hal tersebut, dipertegas lagi dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas dasar kekeluargaan.<sup>2</sup> Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.<sup>3</sup>

Idealnya koperasi yang sehat adalah koperasi yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai koperasi. Kesehatan koperasi adalah kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat dan sangat tidak sehat.<sup>4</sup>

Kenyataan dewasa ini menunjukkan, bahwa koperasi di Indonesia belum memiliki kemampuan untuk menjalankan peranannya secara efektif.<sup>5</sup> Masih banyak koperasi yang tidak melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip serta nilai-nilai koperasi. Koperasi yang menyimpang adalah koperasi yang tidak melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkoperasian, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan keberadaan jati diri koperasi, misalnya mengenai asas, tujuan, prinsip serta keanggotaan koperasi.

Disamping itu, apabila ternyata koperasi tidak melakukan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasarnya, maka dapat diartikan koperasi tidak lagi dijalankan atau

---

<sup>1</sup> Arifinal Chaniago, **Perkoperasian Indonesia**, Angkasa, Bandung, 1984, hlm 17

<sup>2</sup> Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

<sup>3</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian

<sup>4</sup> Pasal 1 Angka 8, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/ 2008 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi

<sup>5</sup> Panji Anoraga dan Ninik Widiyanti, **Dinamika Koperasi**, PT Asdi Mahasatya, Jakarta, 2007, hlm 127

dikelola sesuai mandat anggota bahkan dapat saja melanggar hukum yang berlaku.<sup>6</sup> Terhadap koperasi yang menyimpang pemerintah dapat melakukan tindakan berupa pembinaan dan pemberian sanksi.

Bentuk pembinaan berupa memberikan bimbingan dan kemudahan dalam bentuk: pengembangan kelembagaan dan bantuan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan penelitian koperasi, bimbingan usaha yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggota, memperkuat permodalan dan pembiayaan koperasi, memberikan bantuan pengembangan jaringan dan kerja sama antar koperasi dan badan usaha lain, dan lain sebagainya.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian terdapat dua sanksi yang dapat diberikan terhadap koperasi yang menyimpang, yaitu sanksi administratif dan sanksi pembubaran. Sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian berupa:<sup>7</sup> teguran tertulis sekurang-kurangnya 2 (dua) kali, larangan untuk menjalankan fungsi sebagai Pengurus atau Pengawas Koperasi, Pencabutan Izin Usaha, dan pembubaran oleh Menteri.

Pembubaran koperasi diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa: Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan:<sup>8</sup>

- a. Keputusan Rapat anggota;
- b. Jangka waktu berdirinya telah berakhir; dan/atau
- c. Keputusan Menteri.

Menteri dapat membubarkan koperasi apabila:<sup>9</sup>

- a. Koperasi tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dan atau tidak melaksanakan ketentuan dalam anggaran dasar koperasi yang bersangkutan,
- b. Kegiatan koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan yang dinyatakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
- c. Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,

---

<sup>6</sup> Penjelasan Pasal 3 huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 Tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah

<sup>7</sup> Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang perkoperasian.

<sup>8</sup> Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

<sup>9</sup> Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomer 17 Tahun 1994 Tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah

- d. Koperasi tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata selama 2 tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal pengesahan akta pendirian koperasi.

Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang memiliki jumlah koperasi yang tinggi. Jumlah koperasi di Banyuwangi Per Juli 2012 sebanyak 866 koperasi yang terdiri dari 747 koperasi aktif<sup>10</sup> dan 119 koperasi tidak aktif<sup>11</sup>. Dari 119 koperasi yang tidak aktif tersebut pemerintah setempat mengkategorikan 18 koperasi<sup>12</sup> yang benar-benar tidak sehat dan diusulkan untuk dibubarkan. Namun dalam pelaksanaan pembubaran koperasi, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi menemukan permasalahan karena terdapat beberapa hambatan yang muncul dalam pelaksanaan pembubaran koperasi.

## II. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah Implementasi BAB XIII Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang mekanisme Pembubaran, Penyelesaian Dan Hapusnya Badan Hukum Koperasi di Kabupaten Banyuwangi?
2. Apakah hambatan hukum yang ditemui oleh Dinas Koperasi dan UMKM dalam rangka pelaksanaan pembubaran, penyelesaian dan hapusnya badan hukum koperasi?
3. Apa saja solusi hukum yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut?

## III. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mendeskripsikan dan mengetahui Implementasi BAB XIII Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang mekanisme Pembubaran, Penyelesaian Dan Hapusnya Badan Hukum Koperasi di Kabupaten Banyuwangi
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis hambatan hukum apa yang ditemui oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi dalam rangka pelaksanaan pembubaran, penyelesaian dan hapusnya badan hukum koperasi.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis solusi hukum yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi untuk mengatasi hambatan-hambatan yang timbul karena pembubaran, penyelesaian dan hapusnya badan hukum koperasi.

---

<sup>10</sup> Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Banyuwangi, *Rekapitulasi Data Koperasi Kabupaten Banyuwangi Per Juli 2012*

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Banyuwangi, *Berita Acara Tim Teknis Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banyuwangi Tentang Pembekuan Koperasi Pelaku Usaha Simpan Pinjam*.



#### IV. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, untuk mengkaji dan meneliti hambatan Dinas Koperasi dan UMKM dalam melaksanakan pembubaran, penyelesaian dan hapusnya badan hukum koperasi. Agar hasil yang diperoleh lebih relevan dan maksimal, diadakan penelitian lapangan terkait permasalahan yang ada, yaitu dengan studi langsung di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi.

#### V. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### **1. Implementasi BAB XIII Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang mekanisme Pembubaran, Penyelesaian Dan Hapusnya Badan Hukum Koperasi di Kabupaten Banyuwangi**

Ketentuan mengenai perkoperasian diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, meski ketentuan tersebut telah berlaku sejak tanggal 30 Oktober tahun 2012, namun belum dibentuk peraturan pelaksana mengenai pembubaran, penyelesaian dan hapusnya badan hukum. Sehingga hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah. Sesuai dengan Ketentuan Penutup pada Pasal 124 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, menyatakan bahwa, Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan undang-undang ini.<sup>13</sup>

Penulis telah melakukan wawancara kepada pihak yang memiliki kompetensi untuk melakukan pembubaran koperasi, beliau juga membenarkan bahwa untuk melakukan pembubaran koperasi masih menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994, berikut petikan wawancara saat penulis mewawancarai Kepala Bagian Penyuluhan, Mediasi dan Advokasi Koperasi, bapak Moh. Gopron

*“Dalam melaksanakan Pembubaran, Penyelesaian Dan Hapusnya Badan Hukum Koperasi kami masih menggunakan Peraturan Pemerintah yang lama karena Undang-Undang yang baru belum ada aturan pelaksanaannya. Saat ini perwakilan dari Dinas Koperasi dan UMKM masih menghadiri rapat di pusat untuk menyusun peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Jadi selama*

---

<sup>13</sup> Pasal 124 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

*peraturan pelaksana yang baru belum ada maka kami masih menggunakan peraturan pelaksana yang lama.”<sup>14</sup>*

Sebelum melakukan pembubaran koperasi, Dinas Koperasi dan UMKM terlebih dahulu melakukan penelitian dengan cara melakukan pemeriksaan kesehatan koperasi sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 20/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi dan pemeringkatan koperasi sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 22/Per/M.KUKM/IV/2007 Tentang Pedoman Pemeringkatan Koperasi.

Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui keadaan koperasi apakah koperasi dalam keadaan sehat atau tidak. Selain itu juga untuk mengetahui apakah koperasi yang bersangkutan telah melakukan kegiatan koperasi sesuai dengan Undang-Undang Perkoperasian dan Anggaran Dasar Koperasi.

Penelitian terhadap koperasi juga dilakukan untuk memperoleh bukti yang kuat bahwa koperasi yang bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat pembubaran koperasi oleh pemerintah. Berikut hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM:

**Tabel 4**  
**Hasil Penelitian Oleh Dinas Koperasi Dan UMKM**  
**Per Juli 2012**

No	Jenis Koperasi	Jumlah Kop.	RAT 2011	Kop. Aktif	Kop. Tidak Aktif	Kop. Baru
1	KUD Pertanian	44	27	34	10	0
2	KUD Mina	3	1	2	1	0
3	Kopontren	57	53	55	2	0
4	Kopinkra	12	3	3	9	0
5	Kopti	1	0	0	1	0
6	KPRI	65	51	54	11	0
7	Kopkar BUMN/BUMS	92	82	83	9	0
8	Kop. Angkatan Darat	1	1	1	0	0
9	Kop. Angkatan Laut	1	1	1	0	0
10	Kop. Kepolisian	1	1	1	0	0
11	Koperasi Serba Usaha	129	100	100	29	0
12	Koppas	5	0	0	5	0
13	KSP	58	49	49	9	0
14	Kop. Angkutan Darat	4	0	0	4	0

<sup>14</sup> Moh. Gopron, Kabag Penyuluhan, Mediasi dan Advokasi Koperasi, wawancara tanggal 4 april 2013, data primer telah diolah.

15	KBPR	1	1	1	0	0
16	KOPWAN	219	32	32	0	187
17	Koperasi Profesi	1	0	1	0	0
18	Koperasi Veteran	1	1	1	0	0
19	Koperasi Wredatama	5	5	5	0	0
20	Kop. Papabri	1	1	1	0	0
21	Koperasi Mahasiswa	3	0	0	3	0
22	Koperasi Pemuda	2	0	0	2	0
23	Kop. Pedagang Kaki Lima	1	0	0	1	0
24	Koperasi Lainnya	67	52	54	13	0
25	Koperasi Pangan	88	79	80	8	0
26	Koperasi Sekunder	4	1	2	2	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>866</b>	<b>541</b>	<b>560</b>	<b>119</b>	<b>187</b>

Sumber: data primer telah diolah<sup>15</sup>

Dari hasil penelitian diatas, dapat dilihat bahwa dari 866 koperasi terdapat 119 koperasi yang tidak aktif. Untuk itu Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Banyuwangi melakukan tindakan berupa pembinaan serta pemberian sanksi pembubaran. Pembinaan dilakukan agar koperasi yang bersangkutan dapat menjadi aktif kembali dan dapat melakukan kegiatan koperasi sesuai dengan undang-undang perkoperasian serta anggaran dasar koperasi. Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi terhadap koperasi yang tidak aktif tersebut berupa:

- 1) Melakukan pergantian pengurus koperasi
- 2) Melakukan pelatihan mengenai manajemen koperasi terhadap pengurus
- 3) Melakukan pengawasan dan pemantauan agar kegiatan koperasi dapat berjalan sesuai dengan Undang-Undang Perkoperasian dan Anggaran Dasar Koperasi
- 4) Apabila koperasi yang bersangkutan kekurangan modal dalam menjalankan kegiatannya maka Dinas Koperasi dan UMKM dapat memberikan rekomendasi untuk mendapatkan pinjaman modal dari lembaga keuangan atau pihak lain yang dapat memberikan pinjaman.

Namun, apabila koperasi tersebut tidak dapat dibina dan tidak dapat diharapkan kelangsungan hidupnya, maka Dinas Koperasi Dan UMKM akan melakukan pembubaran

<sup>15</sup> Dinas Koperasi Dan UMKM, *Rekap Data Keraggaan Koperasi Kabupaten Banyuwangi*, Banyuwangi, 2012, data primer diolah

koperasi. Dari 119 koperasi yang tidak aktif, Dinas Koperasi menetapkan 18 koperasi<sup>16</sup> yang sangat tidak sehat dan layak untuk dibubarkan. Dengan alasan bahwa:<sup>17</sup>

- 1) Terbukti bahwa Koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan undang-undang perkoperasian dan atau tidak melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Dasarnya (tidak melaksanakan RAT berturut-turut lebih dua tahun).
- 2) Kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan, karena selama dua tahun berturut-turut tidak melakukan kegiatan usaha.
- 3) Melanggar ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, pada tanggal 5 Juli 2012 Dinas Koperasi Dan UMKM menyampaikan Berita Acara Pembekuan Koperasi Pelaku Usaha Simpan Pinjam (surat rencana pembubaran) kepada pengurus 18 koperasi yang layak untuk dibubarkan. Pengurus ataupun anggota dari koperasi dapat mengajukan keberatan kepada Dinas Koperasi Dan UMKM dalam waktu 4 (empat) bulan setelah berita acara dibuat. Dalam rangka mengetahui kelanjutan dari berita acara pembekuan koperasi tertanggal 5 Juli 2012 penulis melakukan wawancara kepada pihak yang berkompeten. Berikut wawancara penulis kepada Kepala Bagian Penyuluhan, Mediasi Dan Advokasi Koperasi:

*“Untuk 18 koperasi yang sudah dicantumkan dalam berita acara tim teknis mengenai pembekuan koperasi tersebut hanya ada 10 koperasi saja yang benar benar tidak ada masalah untuk dibubarkan. Sisanya tidak dapat dibubarkan dan masih diusahakan untuk aktif lagi. Karena koperasi yang bersangkutan masih memiliki hutang kepada pemerintah dan aset koperasi tidak mencukupi untuk membayar hutangnya, dan ada beberapa koperasi yang asetnya dibawa lari oleh pengurus koperasi. Namun, 10 koperasi tersebut juga belum dibentuk tim penyelesai karena anggaran dari pemerintah belum ada.”*<sup>18</sup>

Menurut narasumber, yaitu Kepala Bagian Penyuluhan, Mediasi dan Advokasi Koperasi bahwa dari 18 koperasi yang tercantum dalam berita acara pembekuan koperasi hanya ada 10 koperasi saja yang dapat dibubarkan, namun demikian belum dibentuk tim penyelesai untuk melakukan penyelesaian pembubaran koperasi. Serta 8 koperasi lain karena beberapa hal tidak dapat dibubarkan sehingga koperasi yang bersangkutan diusahakan untuk aktif kembali.

---

<sup>16</sup> Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Banyuwangi, *Berita Acara Tim Teknis Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banyuwangi Tentang Pembekuan Koperasi Pelaku Usaha Simpan Pinjam*.

<sup>17</sup> Ibid

<sup>18</sup> Moh. Gopron, Kabag Penyuluhan, Mediasi dan Advokasi Koperasi, wawancara tanggal 4 april 2013, data primer telah diolah

## **2. Hambatan hukum yang ditemui oleh Dinas Koperasi dan UMKM dalam rangka pelaksanaan pembubaran, penyelesaian dan hapusnya badan hukum koperasi**

Didalam melakukan pembubaran koperasi tidak terlepas dari beberapa hambatan yang muncul. Dinas Koperasi dan UMKM di dalam melakukan pembubaran koperasi menemui beberapa hambatan, baik hambatan yang berasal dari Dinas Koperasi dan UMKM maupun hambatan dari koperasi yang akan dibubarkan.

Hambatan yang berasal dari Dinas Koperasi dan UMKM meliputi, kurangnya Tim Teknis yang dimiliki Dinas Koperasi dan UMKM dalam melakukan pengawasan maupun penelitian terkait dengan penilaian kesehatan koperasi setiap tahunnya terhadap koperasi-koperasi yang ada di Banyuwangi. Jumlah koperasi di Banyuwangi per Juli 2012 mencapai 866 koperasi sedangkan Tim Teknis yang dimiliki Dinas Koperasi dan UMKM hanya 7 orang. Sehingga tidak seimbang dengan jumlah koperasi yang ada di Banyuwangi maka penelitian koperasi kurang maksimal.

Selain itu, hambatan yang ditemui adalah Dinas Koperasi dan UMKM tidak dapat membentuk Tim Penyelesai untuk melakukan penyelesaian terhadap koperasi yang akan dibubarkan, karena anggaran atau biaya dari pemerintah pusat yaitu dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah belum juga turun. Sehingga, pelaksanaan pembubaran pun menjadi terhambat dan lama penyelesaiannya.<sup>19</sup> Moh. Gopron mengatakan bahwa biaya untuk melakukan pembubaran koperasi tidaklah sedikit, jadi apabila dari pemerintah belum juga memberikan dana maka pembubaran koperasi belum dapat dilaksanakan.

Seperti yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah bahwa seluruh biaya dan atau pengeluaran yang secara wajar diperlukan oleh Tim Penyelesai dalam rangka melakukan penyelesaian pembubaran koperasi menjadi beban anggaran Departemen yang membidangi Koperasi.<sup>20</sup> Biaya dan atau pengeluaran yang diperlukan dalam pelaksanaan penyelesaian pembubaran koperasi dianggap wajar, apabila secara nyata berdasarkan bukti dan alasan yang sah biaya/pengeluaran tersebut memang diperlukan bagi

---

<sup>19</sup> Moh. Gopron, Kepala Bagian Penyuluhan, Mediasi dan Advokasi, wawancara tangga, 4 April 2013 10.00 WIB, data primer diolah

<sup>20</sup> Lihat pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 Tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah.

kepentingan kelancaran pelaksanaan penyelesaian pembubaran koperasi. Biaya dan atau pengeluaran yang dimaksud, mencakup pula upah anggota tim penyelesai.<sup>21</sup>

Mengenai hambatan yang berasal dari koperasi yang akan dibubarkan Moh. Gopron mengatakan:

*“Permasalahan yang menghambat terjadinya pembubaran koperasi meliputi, para kreditur koperasi (misalnya: bank maupun pemerintah) tidak mau menerima pembubaran koperasi karena pinjaman belum dikembalikan, para anggota juga tidak mau menerima pembubaran dan menuntut seluruh simpanan yang ada dikoperasi baik simpanan pokok maupun tabungan dikembalikan dan tidak mau menerima kerugian meski koperasi dalam keadaan pailit, aset yang dimiliki koperasi tidak mencukupi untuk membayar utangnya kepada para kreditur. Kebanyakan rusaknya suatu koperasi hingga koperasi itu harus dibubarkan berasal dari pengurus koperasi seperti uang koperasi dibawa lari oleh pengurus ataupun disalahgunakan oleh pengurus, hal tersebut telah melanggar ketentuan undang-undang perkoperasian”<sup>22</sup>*

Menurut narasumber yaitu Kepala Bagian Penyuluhan, Mediasi dan Advokasi Koperasi, hambatan-hambatan yang muncul khususnya hambatan yang berasal dari koperasi itu sendiri yang membuat pelaksanaan pembubaran koperasi menjadi terhambat. Kebanyakan rusaknya suatu koperasi berasal dari pengurus koperasi menyalahgunakan kewenangannya sebagai pengurus, sehingga melaksanakan kegiatan koperasi tidak sesuai dengan undang-undang perkoperasian dan anggaran dasar koperasi.

Menurut peneliti, kurangnya pengawasan dari Dinas Koperasi dan UMKM karena keterbatasan Tim Teknis lah yang menjadi penyebab mengapa pengurus koperasi melakukan penyalahgunaan wewenang sebagai pengurus. Karena, jika Dinas Koperasi melakukan pengawasan secara maksimal maka kesempatan pengurus koperasi untuk menyalahgunakan wewenang sebagai pengurus sangatlah kecil.

Hambatan pembubaran koperasi juga dapat dikaji menggunakan teori penegakan yang dikemukakan oleh *Lawrence Friedman* yang terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).

Struktur hukum meliputi badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta lembaga-lembaga lain seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan aparat penegak hukum

---

<sup>21</sup> Lihat Penjelasan pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 Tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah.

<sup>22</sup> Moh. Gopron, Kepala Bagian Penyuluhan, Mediasi dan Advokasi, wawancara tangga, 4 April 2013 10.00 WIB, data primer diolah

lainnya. Dinas Koperasi dan UMKM dan Koperasi juga merupakan lembaga penegak hukum dibidang perkoperasian. Hambatan pembubaran koperasi yang berasal dari pemerintah yang berwenang meliputi, kurangnya Tim Teknis dalam melakukan penelitian terkait dengan penilaian kesehatan koperasi sehingga kegiatan penelitian kurang maksimal serta anggaran pembubaran koperasi dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dinilai lambat untuk diserahkan kepada Dinas Koperasi dan UMKM sehingga proses pembubaran koperasi tertunda.

Sedangkan hambatan pembubaran yang berasal dari koperasi yang akan dibubarkan adalah:

1) Penyalahgunaan wewenang dari pengurus koperasi

Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pengurus misalnya, membawa lari aset yang dimiliki koperasi dan menggunakan aset koperasi untuk kepentingan pribadi. Hal ini dapat menghambat pembubaran koperasi karena kebanyakan pengurus melarikan diri atau tidak dapat mengembalikan aset yang telah ia gunakan sehingga proses pembubaran koperasi terhambat.

Seharusnya pengurus koperasi melakukan upaya untuk kepentingan, kemanfaatan dan kemajuan koperasi, bukan menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi. Pengurus berwenang untuk mengelola organisasi dan usaha koperasi. Sehingga penguruslah yang menentukan apakah program-program koperasi yang telah disepakati dalam rapat anggota benar-benar dapat dijalankan. Apabila pengurus dengan kelalaian maupun kesengajaan menyalahgunakan wewenang yang telah diberikan maka koperasi dapat mengalami kerugian.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, pengurus koperasi baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berkewajiban menanggung kerugian yang diderita koperasi bila hal itu terjadi karena adanya unsur kesengajaan dan atau kelalaian pengurus.<sup>23</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian juga disebutkan bahwa setiap pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Pasal 34 ayat (1), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian  
<sup>24</sup> Pasal 60 ayat (3), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

Kerugian koperasi yang dilakukan karena kesengajaan ataupun kelalaian oleh pengurus dapat digugat ke pengadilan. Jika terbukti melakukan tindakan tersebut maka pengurus wajib menanggung segala kerugian koperasi. Begitu pula sebaliknya, apabila pengurus koperasi dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindakan yang merugikan koperasi dan telah melakukan upaya-upaya untuk mencegah agar koperasi tidak mengalami kerugian maka ia terbebas dari tanggung jawab tersebut.

2) Anggota Koperasi tidak setuju dengan pembubaran koperasi

Anggota koperasi tidak setuju dengan rencana pembubaran koperasi karena para anggota menuntut semua simpanan yang ada di koperasi dapat dikembalikan. Anggota koperasi setuju dengan rencana pembubaran koperasi apabila seluruh simpanannya dikembalikan. Sedangkan aset yang dimiliki koperasi tidak cukup untuk mengembalikan simpanan anggota dan melunasi hutang-hutang koperasi.

Koperasi merupakan kumpulan anggota, semakin banyak jumlah anggota koperasi maka semakin besar pula jumlah modal yang dimiliki koperasi. Selain sebagai pengguna jasa koperasi, anggota koperasi juga sebagai pemilik koperasi. Jadi apabila koperasi mengalami kerugian maka anggota koperasi juga bertanggung jawab sebatas simpanan yang ia miliki.

3) Kreditur Koperasi tidak setuju dengan pembubaran koperasi

Modal koperasi berasal dari simpanan dari anggota koperasi, selain itu juga berasal dari pinjaman. Modal pinjaman berasal dari bank, lembaga keuangan, koperasi lain, pemerintah dan lain-lain.

Apabila terjadi pembubaran koperasi, maka akan berakibat pada kreditur koperasi. Hal ini yang membuat para kreditur tidak setuju dengan pembubaran koperasi, karena kreditur takut jika koperasi tidak dapat membayar hutang-hutangnya. Sehingga pembubaran koperasi menjadi terhambat.

4) Aset koperasi tidak cukup untuk membayar hutang koperasi

Dengan adanya pembubaran koperasi maka seluruh aset koperasi akan dijual untuk melunasi hutang-hutangnya. Namun yang terjadi, seluruh aset koperasi tidak cukup untuk melunasi seluruh hutang koperasi. Sehingga baik Dinas Koperasi dan UMKM, pengurus maupun anggota koperasi mencari cara agar dapat melunasi seluruh hutang koperasi. Agar proses pembubaran koperasi dapat segera dilakukan.



Substansi hukum meliputi segala aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk juga putusan pengadilan. Aturan yang terkait dengan permasalahan ini adalah segala peraturan mengenai perkoperasian. Hambatan pembubaran koperasi yang berasal dari segi substansi hukum adalah belum dibuatnya peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, sehingga untuk menghindari kekosongan hukum maka, pemerintah masih menggunakan Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Budaya hukum merupakan pandangan, kebiasaan atau perilaku masyarakat terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip dari sistem hukum yang berlaku. Dalam permasalahan ini budaya hukum yang dimaksud adalah penilaian masyarakat terhadap koperasi. Masyarakat kurang tahu akan peraturan mengenai koperasi. Maksudnya, masyarakat tidak mengetahui secara detail mengenai, nilai, prinsip, dan tujuan koperasi. Kurang tahunya masyarakat tersebut akan menghambat kegiatan koperasi.

### **3. Solusi hukum yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut**

Didalam mengatasi hambatan pembubaran koperasi, maka Dinas Koperasi dan UMKM melakukan beberapa upaya untuk mengatasi hambatan tersebut, menurut Kepala bagian penyuluhan, mediasi dan advokasi mengatakan:

*“upayanya dengan mengadakan pra rapat, antara pengurus, pengawas (pemerintah), serta anggota untuk melakukan pendekatan agar menemukan jalan keluar yang tepat yang dapat diterima berbagai pihak, jika kerusakan koperasi karena kesalahan pengurus maka pemerintah mengadakan mediasi agar pengurus mau bertanggung jawab, apabila tidak mau bertanggung jawab atau pengurus itu lari maka pengurus dapat digugat ke pengadilan, melakukan penggabungan koperasi, dan melakukan pembinaan agar koperasi dapat aktif kembali.”<sup>25</sup>*

Dari hasil wawancara tersebut diketahui, berbagai tindakan dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM untuk mengatasi hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pembubaran koperasi. Upaya pertama yang dilakukan adalah dengan mengadakan pendekatan kepada pengurus dan anggota koperasi. Apabila Anggota Koperasi tidak setuju dengan rencana pembubaran koperasi oleh pemerintah, maka Dinas Koperasi dan UMKM melakukan pendekatan dengan mengadakan Rapat Pra pembubaran dengan

---

<sup>25</sup> Moh. Gopron, Kepala Bagian Penyuluhan, Mediasi dan Advokasi, wawancara tanggal, 4 April 2013 10.00 WIB, data primer diolah

pengurus dan anggota koperasi yang bersangkutan. Pendekatan dilakukan guna membujuk anggota agar setuju dengan rencana pembubaran koperasi serta membahas mengenai pembubaran koperasi terkait dengan pembayaran hutang koperasi.

Kedua, Dinas Koperasi dan UMKM melakukan *Amalgamasi* (penggabungan koperasi). Jika dalam rapat pra pembubaran, Anggota koperasi tetap pada pendapatnya bahwa tidak setuju dengan pembubaran koperasi maka Dinas Koperasi dan UMKM menyarankan untuk melakukan amalgamasi. Amalgamasi atau penggabungan berarti penyatuan (merger) dua koperasi atau lebih menjadi satu koperasi yang lebih besar tanpa pembubaran atau likuidasi dari koperasi-koperasi yang bergabung.<sup>26</sup> Dengan adanya amalgamasi diharapkan koperasi-koperasi yang lemah dapat bergabung dengan koperasi-koperasi yang kuat agar tidak terjadi pembubaran dan menghindarkan koperasi dari akibat-akibat pembubaran.

Ketiga, Dinas Koperasi dan UMKM melakukan pembinaan terhadap koperasi yang akan dibubarkan. Apabila upaya untuk melakukan amalgamasi tidak dapat dilakukan dikarenakan koperasi yang bersangkutan tidak mau untuk digabungkan maka Dinas Koperasi dan UMKM melakukan pembinaan agar kegiatan koperasi dapat aktif kembali. Pembinaan tersebut berupa, melakukan reformasi pengurus, memberikan rekomendasi agar koperasi mendapatkan pinjaman modal, mengubah anggaran dasar koperasi dengan persetujuan rapat anggota, mengawasi kegiatan koperasi agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkoperasian dan Anggaran Dasar Koperasi, dan lain sebagainya.

Keempat, Dinas Koperasi dan UMKM memberikan saran kepada anggota untuk mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap pengurus koperasi yang melanggar ketentuan Undang-Undang Perkoperasian. Sebelum diajukan gugatan ke pengadilan, Dinas Koperasi dan UMKM melakukan mediasi antara Anggota Koperasi dengan Pengurus Koperasi, untuk menyelesaikan permasalahan terkait penyalahgunaan wewenang pengurus koperasi. Jika pengurus lari dari tanggung jawab maka anggota koperasi dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

---

<sup>26</sup>

Hans Munker, *10 Kuliah Mengenai Hukum Koperasi*, Jakarta :Rekadesa, 2012, hlm. 159

## **VI. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Dalam melakukan pembubaran koperasi, Dinas Koperasi dan UMKM menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 Tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah. Mekanisme pembubaran, penyelesaian dan hapusnya badan hukum koperasi diatur dalam Pasal 3 sampai Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 Tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah. Namun, dalam prakteknya peraturan pemerintah tersebut belum dilaksanakan secara efektif.
2. Dalam melakukan pembubaran koperasi, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi menemukan banyak permasalahan yang menghambat pelaksanaan pembubaran koperasi, hambatan-hambatan tersebut antara lain: Kurangnya Tim Teknis yang dimiliki Dinas Koperasi dan UMKM dalam melakukan pengawasan maupun penelitian koperasi, Anggaran atau biaya untuk melakukan pembubaran koperasi dari pemerintah pusat yaitu dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah belum juga turun, Penyalahgunaan wewenang oleh pengurus koperasi, Anggota koperasi tidak setuju dengan rencana pembubaran koperasi, Kreditur koperasi tidak setuju dengan rencana pembubaran koperasi, Aset/harta kekayaan yang dimiliki koperasi tidak cukup untuk melunasi hutang-hutang koperasi.
3. Didalam mengatasi hambatan pembubaran koperasi, maka Dinas Koperasi dan UMKM melakukan beberapa upaya untuk mengatasinya yaitu dengan cara: Dinas Koperasi dan UMKM melakukan pendekatan dengan mengadakan Rapat Pra pembubaran dengan pengurus dan anggota koperasi yang bersangkutan, Dinas Koperasi dan UMKM melakukan Amalgamasi (pengabungan koperasi), Dinas Koperasi dan UMKM melakukan pembinaan terhadap koperasi yang akan dibubarkan, Dinas Koperasi dan UMKM memberikan saran kepada anggota untuk mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap pengurus koperasi yang melanggar ketentuan Undang-Undang Perkoperasian.

### **B. Saran**

1. Dinas Koperasi dan UMKM lebih aktif lagi dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 Tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah, agar peraturan tersebut dapat berlaku secara efektif dan dengan adanya pembubaran koperasi dapat meminimalisasi adanya kegiatan perkoperasian yang tidak sesuai dengan Undang-Undang.

2. Untuk mengatasi hambatan yang terjadi karena pembubaran koperasi, maka Dinas Koperasi dan UMKM hendaknya melakukan beberapa tindakan antara lain:
  - a. Dinas Koperasi dan UMKM lebih aktif lagi dalam mensosialisasikan Undang-Undang Perkoperasian terhadap masyarakat terutama terhadap Pengurus dan Anggota Koperasi agar dapat melakukan kegiatan Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - b. Dinas Koperasi dan UMKM lebih selektif lagi dalam memberikan izin pendirian koperasi, untuk meminimalisasi adanya kegiatan koperasi yang bertentangan dengan undang-undang dan anggaran dasar koperasi agar tidak menimbulkan kerugian bagi anggota koperasi.
  - c. Mengenai hambatan terhadap kurangnya tim teknis dalam melakukan pemeriksaan, penelitian, pengawasan serta pembinaan terhadap koperasi, hendaknya Dinas Koperasi dan UMKM melakukan pelatihan atau pendidikan khusus terhadap para staf di Dinas Koperasi dan UMKM baik yang baru ataupun yang lama agar lebih ahli. Sehingga dapat membantu dalam melakukan pemeriksaan, penelitian, pengawasan serta pembinaan terhadap koperasi.
  - d. Perlu dibuat aturan yang tegas mengenai sanksi terhadap pengurus ataupun anggota koperasi yang melakukan tindakan merugikan koperasi baik yang sengaja ataupun tidak sengaja.
3. Melaksanakan segala upaya untuk mengatasi hambatan pembubaran koperasi, agar pelaksanaan pembubaran koperasi dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

## VII. DAFTAR PUSTAKA

Arifinal Chaniago, 1984, **Perkoperasian Indonesia**, Bandung : Angkasa

Hans Munkner, 2012, **10 Kuliah Mengenai Hukum Koperasi**, Jakarta: Rekadesa.

Panji Anoraga dan Ninik Widiyanti, 2007, **Dinamika Koperasi**, Jakarta : PT Asdi Mahasatya

Moh. Gopron, Kepala Bagian Penyuluhan, Mediasi dan Advokasi, wawancara tangga, 4 April 2013 10.00 WIB, data primer diolah

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 Tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah

Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 20/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi

Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi, **Rekapitulasi Data Koperasi Kabupaten Banyuwangi Per Juli 2012**, Banyuwangi.

Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Banyuwangi, **Berita Acara Tim Teknis Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banyuwangi Tentang Pembekuan Koperasi Pelaku Usaha Simpan Pinjam**